

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Corona Virus Disease* (COVID-19) merupakan virus yang ditemukan pertama kali di negara Cina pada akhir tahun 2019. Virus tersebut menyebar secara cepat ke berbagai negara termasuk Indonesia. COVID-19 terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak di berbagai sektor, salah satu sektor yang paling terdampak yaitu sektor perekonomian. Perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan, terlebih setelah diberlakukannya berbagai kebijakan dalam pembatasan kegiatan mulai dari *lockdown* hingga PPKM berlevel.

Pembatasan tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian melambat dan menyebabkan keuangan negara, yaitu APBN, turut serta terdampak akan adanya pandemi COVID-19. Menanggapi merebaknya virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya dituangkan pada PERPPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan yang dilakukan yaitu adanya peningkatan belanja Kesehatan, pengadaan bantuan sosial, dan juga pemberian stimulus untuk UMKM. Merespon akan hal tersebut,

anggaran yang ada di Kementerian/Lembaga mengalami pemangkasan yang kemudian dialokasikan pada percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Adanya kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait laporan keuangan selama pandemi COVID-19 terjadi. Penerbitan kebijakan tersebut sebagai langkah dari pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat tetap berkualitas serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang ada. Pengambilan keputusan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan laporan keuangan masa pandemi COVID-19.

Beberapa kebijakan terkait keuangan yang diterbitkan selama pandemi COVID-19 yaitu *COVID 19: IPSASB Guidance, Resource to Maintain Strong PFM* yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board*, Panduan terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, PMK Nomor 38/PMK.02/2020), dan PMK nomor 43/PMK.05/2020. Selain itu, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2020. Kebijakan tersebut akan mendorong kementerian/Lembaga memangkas anggaran dan mengalokasikan anggaran belanja yang bukan prioritas pada belanja bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dituangkan dalam pelaporan keuangan dengan berdasarkan pada PMK nomor 43/PMK.05/2020 pasal 14 yang mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN terkait COVID-19 menjadi bagian laporan keuangan suatu entitas yang berpedoman pada SAP dan PMK

terkait. Peraturan yang diberlakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 pada umumnya mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran sendiri diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010 pada PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, komponen-komponen yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran terkena dampaknya.

Sebagai salah satu satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan juga terdampak dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan fiskal dalam penanganan pandemi COVID-19, KPPN Magelang pun merasakan dampak tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan akuntansi laporan keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran, penulis melakukan analisis lebih lanjut terkait hal tersebut dan kendala saat menerapkan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan mengambil judul “Analisis Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran pada Era Pandemi di KPPN Magelang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perubahan kebijakan akuntansi terkait laporan realisasi anggaran kementerian/lembaga pada masa pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran pada KPPN Magelang di masa pandemi COVID-19 ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh KPPN Magelang dalam pengimplementasian kebijakan akuntansi di masa pandemi COVID-19 ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui dan menganalisis perubahan yang terjadi terhadap kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat terlebih dalam hal laporan keuangan selama masa pandemi COVID-19 bagian Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan dan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi pada masa pandemi COVID-19 dalam rangka merespon penanganan penyebaran COVID-19 terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada KPPN Magelang dalam kurun kurang lebih tiga hingga empat tahun.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPPN Magelang dalam mengimplementasikan kebijakan akuntansi selama masa pandemi COVID-19.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Pembahasan pada penulisan karya tulis tugas akhir ini berfokus pada pembahasan terkait kebijakan akuntansi laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran dan perubahannya akibat dari adanya pandemi COVID-19 serta penerapannya yang dilakukan oleh KPPN Magelang yaitu objek dari karya tulis tugas akhir ini. Analisis yang dilakukan terbatas pada tiga hingga empat tahun mulai dari tahun anggaran 2018. Oleh karena itu, penulis dapat mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi terhadap kebijakan laporan realisasi anggaran pada KPPN Magelang sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19 serta kendala yang dihadapi pada saat menerapkan kebijakan tersebut.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penyusunan karya tulis tugas akhir dengan judul “Analisis Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran pada Era Pandemi di KPPN Magelang”, yaitu :

- a. Bagi penulis, memberikan pemahaman lebih dalam terkait laporan keuangan khususnya pada bagian laporan realisasi anggaran yang digunakan sebagai fokus dalam penulisan ini serta memberikan pemahaman terkait penerapan kebijakan yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, melalui penulisan karya tulis ini, penulis dapat mengetahui bagaimana kesesuaian materi perkuliahan yang telah diberikan dengan pelaksanaannya secara langsung.
- b. Bagi KPPN Magelang, penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan penerapan terkait kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan beserta kebijakan terbaru dalam suatu kondisi dan situasi yang mengharuskan adanya sebuah perubahan.
- c. Bagi masyarakat, penulisan ini dapat memberikan manfaat berupa penambahan wawasan terkait sebuah kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam sebuah laporan keuangan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kementerian/lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS  
AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Laporan Realisasi Anggaran

2.2 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

2.3 Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

2.4 Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

2.5 Akuntansi Pendapatan – LRA

2.6 Akuntansi Belanja

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

3.2.1 Gambaran Umum KPPN Magelang

3.2.1.1 Profil Umum KPPN Magelang

3.2.1.2 Visi, Misi dan Tujuan KPPN Magelang

3.2.1.3 Tugas dan Fungsi KPPN Magelang

3.2.1.4 Struktur Organisasi KPPN Magelang

3.2.2 Gambaran Penerapan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran pada KPPN Magelang

3.2.2.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran pada KPPN Magelang

3.2.2.2 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran pada KPPN Magelang

3.2.2.3 Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran pada KPPN  
Magelang

3.2.2.4 Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran pada KPPN  
Magelang

3.2.2.5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada KPPN Magelang  
2018-2021

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Masa Pandemi  
COVID-19

- 3.3.2 Tinjauan atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran KPPN Magelang pada Masa Pandemi COVID-19
- 3.3.3 Tinjauan atas Realisasi Penggunaan Anggaran oleh KPPN Magelang pada Masa Pandemi COVID-19
- 3.3.4 Kendala dalam Penatausahaan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran KPPN Magelang pada Masa Pandemi COVID-19

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS